

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi informasi, fraud menjadi ancaman serius bagi stabilitas keuangan, kepercayaan publik, dan integritas bisnis. Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi juga menghadapi peningkatan kasus fraud. Upaya pencegahan dan pemberantasannya penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, sehingga penelitian mengenai fraud relevan untuk memahami pola, penyebab, dan dampaknya. *Good Governance* telah menjadi kebutuhan mayoritas rakyat yang menginginkan sistem pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat. (Andi, 2021). Masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi juga meminta agar pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien (Hehanussa, 2024).

Komponen utama pengelolaan keuangan daerah yang transparan, sukses, dan efisien adalah penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemerintahan (Sutrisna & Setiawati, 2023). Pemerintahan daerah berperan penting dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan desa termasuk ke dalam komponen dari Pemerintahan Nasional yang berfokus untuk mengelola daerah pedesaan (Priska et al., 2021).

Salah satu indikator kesuksesan pemerintahan daerah adalah keberhasilan dalam mengelola keuangan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah di suatu wilayah menjadi kunci

utama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik. *Good governance* melibatkan keterbukaan informasi, partisipasi publik, serta akuntabilitas pada setiap tahap pengelolaan keuangan. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan yang efektif juga perlu didukung oleh sistem pengawasan yang kuat agar dapat mencegah terjadinya praktik-praktik fraud.

Good governance merupakan prinsip penting dalam mengelola keuangan publik. Hal ini diupayakan agar pemerintah jauh dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Wulandari et al., 2023) karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara bertanggung jawab. Transparansi, misalnya, menjadi komponen penting dalam memberikan akses informasi yang jelas dan terbuka mengenai anggaran serta pengelolaan keuangan pemerintah. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan terkait keuangan mempunyai aturan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan untuk masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan sangat berperan penting agar keputusan terkait keuangan dapat mencerminkan kebutuhan serta harapan publik secara nyata.

Prinsip-prinsip dasar *Good governance* meliputi 5 indikator utama seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum (rule of law) (Ardani et al., 2024). Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal serta mengelola keuangan daerah secara profesional dan bertanggung jawab.

Penerapan good governance dalam keuangan daerah penting untuk menjamin kebijakan dan keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Ardani et al., 2024) Transparansi, misalnya, menjadi komponen penting dalam memberikan akses informasi yang jelas dan terbuka mengenai anggaran serta pengelolaan keuangan pemerintah. Akuntabilitas menjamin bahwa semua keputusan keuangan memiliki dasar yang transparan dan dapat dijelaskan kepada khalayak umum. Penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan agar kebijakan keuangan yang dihasilkan benar-benar mewakili apa yang mereka butuhkan dan inginkan

Menurut Herdika W (2023) Sistem akuntansi keuangan pemerintah adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu entitas pemerintah dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan aktivitas keuangan. Meskipun demikian, tanpa implementasi yang efektif, sistem ini berpotensi disalahgunakan dan menjadi celah terjadinya kecurangan. Sistem akuntansi keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang tepat, konsisten, dan bisa dipercaya. Informasi ini digunakan guna memantau kinerja keuangan pemerintah, mengukur kepatuhan terhadap anggaran, dan memastikan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana publik. Sistem ini juga membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan fiskal dan mengambil keputusan keuangan yang tepat. Fangela Myas Sari dkk. (2024) menemukan bahwa pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah secara nyata berpengaruh dalam upaya pencegahan fraud

Transparansi menjadi elemen penting yang menghasilkan laporan keuangan yang tepat, terpercaya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Julita dan Abdullah (2020), transparansi mencerminkan keterbukaan organisasi dalam menyampaikan informasi yang signifikan, sesuai dengan kebutuhan, serta mudah dijangkau dan dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi berperan penting dalam memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut mencerminkan adanya keterbukaan dari pemerintah desa. Sebaliknya, kurangnya transparansi dapat meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan dana. Menurut Dwi Irawan et al. (2024), transparansi tidak berpengaruh terhadap upaya pencegahan kecurangan. Tetapi, menurut F. Aulia et al. (2024), transparansi ternyata berkontribusi dalam upaya pencegahan kecurangan.

Pengawasan pengelolaan keuangan adalah proses pemantauan dan pengawasan terhadap bagaimana dana dan sumber daya keuangan digunakan dan dikelola dalam suatu organisasi atau entitas. Menurut Andrian (2021), Pengawasan adalah upaya untuk menilai jalannya kegiatan yang sudah dilakukan, guna memastikan semuanya berlangsung sesuai rencana dan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam konteks pengelolaan keuangan, pengawasan menjadi aspek krusial untuk menjamin terwujudnya integritas, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap proses keuangan. Ini juga membantu mencegah penyalahgunaan dana, pemborosan, dan tindakan keuangan yang merugikan organisasi atau entitas terkait. Pengawasan pengelolaan keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana dan sumber daya keuangan suatu organisasi, entitas, atau lembaga dijalankan dengan baik, transparansi, dan sesuai prinsip. Menurut Hariono et al.

(2024), penerapan pengawasan dalam pengelolaan keuangan tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap pencegahan fraud. Sebaliknya, penelitian oleh Nurhadi W (2020) menemukan bahwa pengawasan tersebut memiliki pengaruh signifikan dalam mencegah kecurangan.

Upaya pencegahan fraud merupakan langkah yang diambil guna menghindari perilaku tidak jujur yang berpotensi merugikan pihak lain (Hariawan et al., 2020). Pentingnya pencegahan dan deteksi fraud tidak bisa diragukan lagi. Upaya pencegahan memerlukan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor risiko, kontrol internal yang kuat, serta kebijakan dan prosedur yang efektif. Di sisi lain, deteksi fraud membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi pola-pola anomali, melakukan analisis data secara menyeluruh, dan merespon secara cepat terhadap indikasi-indikasi potensial dari aktivitas yang mencurigakan. Fraud di dalam konteks pemerintahan daerah mencakup berbagai tindakan yang dapat merugikan keuangan negara, seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan dana. Oleh karena itu, pencegahan fraud menjadi hal yang krusial dalam menciptakan lingkungan keuangan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kantor kecamatan adalah bagian dari pemerintah daerah di tingkat kab/kota. Dan kantor kecamatan sebagai penerima DAK, kantor kecamatan memiliki peran dalam pelaksanaan program dan proyek yang didanai DAK, mereka bertanggungjawab mengawasi mengelola, atau melaksanakan program tertentu. Kantor kecamatan juga merupakan salah satu pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan DAK di tingkat lokal. Mereka memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan dengan benar dan mengarah pada tujuan yang

seharusnya yaitu untuk meningkatkan pembangunan dan layanan publik di wilayah kecamatan.

Walaupun pengelolaan proyek seharusnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kenyataannya ditemukan adanya praktik korupsi dalam proyek peningkatan jalan Jenangan–Kesugihan di Ponorogo. Proyek ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Ponorogo untuk Tahun Anggaran 2017, dan kini kasusnya telah memasuki tahap pembacaan putusan oleh majelis hakim di ruang sidang Cakra, Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya. (di kutip dari <https://kanalindonesia.com> yang diakses pada 16 Maret 2024).

Desa berperan penting dalam pembangunan demi tercapainya kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Dukungan anggaran dari pemerintah mendorong kemandirian desa, sehingga tidak terus bergantung pada pusat. Karena itu, pengelolaan keuangan desa perlu dilaksanakan secara teratur, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan melibatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berlandaskan pada prinsip keadilan dan manfaat bagi semua pihak (Atmadja, Adi Saputra 2017).

Kasus dugaan kecurangan di Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan, memicu puluhan warga melakukan unjuk rasa di kantor desa pada Kamis pagi, 30 Maret 2023 pukul 09.00 pagi. Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh kecurigaan terhadap penyalahgunaan dana desa dan dana retribusi Pasar Janti yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Ngrupit. Sebagai respons, warga menuntut adanya kejelasan serta transparansi dari pihak pemerintah desa (dilansir dari <https://jatim.tribunnews.com> diakses pada 18 Maret 2024). Minimnya keterbukaan dari pemerintah desa dalam menyajikan laporan keuangan berdampak pada rendahnya tingkat kepuasan

masyarakat terhadap kinerja mereka. Seperti yang terjadi di Desa Ngrupit, pengelolaan keuangannya masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan benar

Salah satu penyebab terjadinya fraud adalah lemahnya penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAKP) di tingkat desa. Kelemahan ini terlihat dari pencatatan dan pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi pemerintah serta pemanfaatan aplikasi Siskeudes yang tidak optimal. Kondisi tersebut memberi celah terjadinya manipulasi data keuangan atau pengaburan transaksi yang tidak sah. Selain itu, rendahnya Transparansi dalam pengelolaan dana desa turut menjadi faktor pemicu. Minimnya publikasi laporan keuangan, keterlambatan penyampaian informasi anggaran, dan sulitnya akses masyarakat terhadap data penggunaan dana desa membuat kontrol sosial dari warga menjadi lemah. Ketertutupan informasi ini mempermudah oknum untuk menyalahgunakan anggaran tanpa terdeteksi lebih awal. Dari sisi Pengawasan Pengelolaan Keuangan, lemahnya fungsi pengawasan baik dari internal pemerintah desa, BPD, maupun pihak eksternal seperti inspektorat, menyebabkan indikasi kecurangan tidak segera ditemukan. Pengawasan yang hanya dilakukan secara formalitas, tanpa tindak lanjut terhadap temuan, membuat risiko fraud semakin besar.

Keterkaitan ketiga faktor tersebut terlihat jelas pada kasus Desa Ngrupit: lemahnya penerapan SAKP memicu terjadinya pencatatan dan pelaporan yang tidak sesuai standar; kurangnya transparansi menutup akses masyarakat untuk memantau penggunaan dana; dan lemahnya pengawasan memungkinkan penyalahgunaan dana berlanjut tanpa koreksi. Oleh karena itu, penguatan ketiga variabel ini menjadi kunci untuk mencegah fraud di tingkat pemerintahan desa.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, sedangkan pengawasan pengelolaan keuangan tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan pengawasan memiliki pengaruh signifikan (Norhadi Wibowo & Mohammad, 2020; Nurjanah & Istianingsih, 2021).

Penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen seperti Akuntansi Sektor Publik, Good Governance, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Desa, atau Akuntansi Berbasis Akrual. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAKP), Transparansi, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan sebagai faktor yang memengaruhi pencegahan fraud di tingkat pemerintahan desa dan kelurahan. Perbedaan lain terletak pada objek penelitian. Jika penelitian terdahulu berfokus pada instansi pemerintah daerah atau DPRD, penelitian ini mengambil konteks desa dan kelurahan di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo yang memiliki karakteristik unik terkait pengelolaan dana desa, penggunaan aplikasi Siskeudes, serta keterlibatan langsung masyarakat dalam pengawasan.

Dari uraian latar belakang di atas, terlihat bahwa masih terdapat pemerintah yang belum terbuka dan adanya fraud terkait dengan pengolahan laporan keuangan desa. Situasi itulah yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian ini mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Transparansi, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan terhadap Pencegahan Fraud. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi

pencegahan fraud tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan tindakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini akan memberikan kontribusi nyata dalam upaya menciptakan lingkungan keuangan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di tingkat pemerintahan daerah. Sehingga peneliti mengambil judul **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Transparansi, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan terhadap Pencegahan Fraud di Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud di Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
- b. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap pencegahan fraud di Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ?
- c. Apakah Pengawasan Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap pencegahan fraud di Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
- d. Apakah Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Transparansi dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan berpengaruh terhadap pencegahan fraud di Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah terhadap pencegahan fraud di Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
- b. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap pencegahan fraud di Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
- c. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Pengelolaan Keuangan terhadap pencegahan fraud di Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
- d. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, transparansi dan pengawasan pengelolaan keuangan terhadap pencegahan fraud di Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

2. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini memberikan manfaat akademis dan praktis bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dari sisi akademis, hasil penelitian ini menambah referensi ilmiah di bidang akuntansi, khususnya mengenai pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan

desa

b. Bagi Pemerintah Desa Jenangan

Penelitian ini bermanfaat sebagai alat evaluasi dan refleksi terhadap sistem tata kelola dan pengendalian internal yang dimiliki pemerintah desa. Hal ini penting mengingat pengelolaan keuangan desa semakin besar dan rentan terhadap penyimpangan. Melalui pemahaman yang lebih baik, perangkat desa diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaksanaan tugasnya, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat.

c. Bagi Kalangan Akademisi

Temuan penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan teori dan konsep terkait pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Transparansi, dan Pengawasan Keuangan. Ini dapat menjadi kontribusi penting dalam literatur akademis di bidang tersebut.

d. Untuk Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat membuka peluang bagi riset lanjutan yang berkaitan dengan topik sejenis. Mahasiswa, peneliti, dan akademisi dapat menggunakan temuan ini sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian yang lebih lanjut.